

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**Ir. Siti Aisyah, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19670928 199203 2 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	5
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	5
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	6
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	24
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	28
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	29
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	29
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	30
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	30
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	30
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	31
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANTUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
BAB IV PENUTUP	32

## **BAB I**

### **DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 43 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut DLH) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah bidang Lingkungan Hidup dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 6 orang pejabat eselon III, 17 orang pejabat eselon IV dan sejumlah staf dengan spesifikasi dan tingkat pendidikan yang berbeda.

Untuk menghadapi kondisi dan permasalahan lingkungan nasional dan lokal, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu satu hingga lima tahun ke depan dalam tahun 2017 – 2021, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletakkan

kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2017 - 2021 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Lingkungan Hidup menyusun sasaran strategis 2017 – 2021 sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penataan lingkungan hidup;
- b. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup;
- d. Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders;
- e. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Pada tahun 2021 ini Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 9 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG**  
**DILAKSANAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.21.580.299.087,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.424.659.825,- atau 94,64%, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja**  
**Pada Perjanjian Kinerja**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi AKIP OPD	BB	BB	100%
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	100%	111,2%	111,2%
		Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	100%	100%	100%
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	4%	4,24%	106%
		Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	7%	7%	100%
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	7%	7%	100%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	4%	4,24%	106%
		Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah orang/kelompok yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	95 orang/kel	105 orang/kel	110,53%
	Program Penghargaan	Jumlah	95 orang/kel	105	110,53%

	<b>Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>orang/kelompok yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan</b>		orang/kel	
	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan</b>	100%	100%	100%
	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan</b>	4%	4,24%	106%

**2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran**

**Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran**

No	Program/ Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>							
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan) : 9 dokumen	9 dokumen	100	43,366,000	41,362,200	95.38
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah ( LAKIP, LPPD, LKPJ) : 3 dokumen	3 dokumen	100	6,136,500	6,089,900	99.24
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen evaluasi kinerja triwulanan : 4 dokumen	4 dokumen	100	23,329,000	23,171,500	99.32
			Terlaksananya evaluasi kinerja DLH : 2 kegiatan	2 kegiatan	100			
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang dibayarkan dalam 1 tahun : 81 orang	77 orang	95,06	8,589,003,438	8,271,918,395	96.31
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi, petugas PPHPK) : 12 bulan	12 bulan	100	387,238,352	359,469,520	92.83
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							

3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (bangunan) : 2 unit	2 unit	100	95,200,000	89,663,119	94.18
		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (roda dua) : 1 unit	1 unit	100			
		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (roda empat) : 10 unit	10 unit	100			
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya : 91 stel	86 stel	94,5	68,250,000	64,328,000	94.25
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN DLH yang mengikuti Bimtek : 3 orang	7 orang	233,33	10,395,000	7,245,000	69.70
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan : 12 bulan	12 bulan	100	8,500,000	8,494,000	99.93
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan : 2 paket	2 paket	100	126,248,400	111,680,000	88.46
		Peralatan kantor yang di sediakan : 12 bulan	12 bulan	100			
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan : 12 bulan	12 bulan	100	89,526,514	88,826,300	99.22
		Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu : 12 bulan	12 bulan	100			
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan : 12 bulan	12 bulan	100	38,000,000	38,000,000	100
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan : 4 jenis	2 jenis	50	21,032,852	20,850,000	99.13
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah : 12 bulan	12 bulan	100	320,910,006	320,106,136	99.75
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						

6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yang didistribusikan : 20 kali	11 kali	55	25,815,500	18,762,640	72.68
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening tagihan air yang di bayarkan : 155 m <sup>3</sup>	500 m <sup>3</sup>	322,58	236,281,800	221,079,473	93.57
			Rekening tagihan internet yang di bayarkan : 25 mbps	150 mbps	600			
			Rekening tagihan listrik yang di bayarkan : 85000kwh	93676 kwh	110,21			
			Rekening tagihan telpon yang di bayarkan : 2 rekening	2 rekening	100			
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Kesehatan Jasmani (senam mingguan); Jasa Kesehatan Rohani (wirid mingguan, program Ramadhan); Jasa Rohaniwan; Dukungan penerapan new normal : 12 bulan	12 bulan	100	1,248,638,555	1,190,361,885	95.33
			Terpenuhinya jasa kebersihan kantor , sopir kantor, pengamanan kantor dan Honor PTT : 12 bulan	12 bulan	100			
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang Dipelihara : 1 unit roda dua	1 unit roda dua	100	121,100,000	119,016,033	98.28
			Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang Dipelihara : 2 unit roda empat	8 unit roda empat	100			
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor yang Dipelihara : 1 unit	1 unit	100	120,555,000	115,150,000	95.52
			Gedung kantor yang direhab : 1 paket	1 paket	100			
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Instalasi dan Jaringan yang Dipelihara : 12 bulan	12 bulan	100	58,960,000	54,519,336	92.47

			Perengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara : 12 bulan	12 bulan	100			
			Perengkapan kantor yang dipelihara : 12 bulan	12 bulan	100			
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							
1	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>							
1.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1. PP 46 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelenggraan KLHS 2. PermenLHK No 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP 46 Tahun 2016 3. 3. Permendari 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan KLHS RPJMD	Terlaksananya penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD : 1 dokumen	1 dokumen	100	158,882,610	158,727,200	99.90
III	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							
1	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuagan Hidup</b>							
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1. UU 11 tahun 2020 ttg cipta kerja 2. Pp 71 tahun 2014 ttg perlindungan dan pengolahan ekosistem gambut 3. PP No. 22 Tahun 2021	Jumlah dokumen study pemetaan sosial rencana pemulihan Lahan Akses Terbuka (LAT) yang disusun : 1 dokumen Jumlah laut yang didata kualitas air sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya : 6 laut Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 : 19 Kab/Kota	1 dokumen 7 laut 19 kab/kota	100 117 100	1,077,172,800	1,008,593,572	93.63

		4. Permen LHK 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya : 15 objek	15 objek	100			
		5. PermenLHK 16 tahun 2017 ttg pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut	Jumlah objek mangrove yang dipantau : 5 objek	6 objek	120			
		6. KepmenLHK no 201 ttg 2004 ttg kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove	Jumlah Sumber Air yang didata Kualitasnya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya : 9 sumber air	9 sungai 1 danau	111			
			Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan (monev) : 11 objek	11 objek	100			
			Terselenggaranya operasional pengelolaan LB3 : 1 tahun	1 tahun	100			
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim : 8 Kab/Kota	8 kab/kota	100	59,402,000	58,729,700	98.87
		2. Perpres 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional	Jumlah kab/kota yang diidentifikasi emisi gas rumah kaca : 2 Kab/Kota	4 kab./kota	200			
		3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim	Jumlah peserta sosialisasi Program Kampung Iklim : 50 orang	50 orang	100			
		4. Peraturan Menteri LHK No. P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca						

		5. Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim							
1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1. UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. PP Nomor 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 3. Kepres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 4. PermenLHK Nomor P.23/2020 tentang Laboratorium Lingkungan	Jumlah pengadaan bahan kimia yang disediakan : 1 paket Jumlah pengadaan peralatan laboratorium yang disediakan : 16 unit Jumlah pengadaan supporting laboratorium yang disediakan : 8 jenis Jumlah UPTD Laboratorium yang dioperasionalkan : 1 UPTD	1 paket 16 unit 8 jenis 1 uptd	100 100 100 100	2,313,035,380	2,302,375,731	99.54	
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>								
1	<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi</b>								
1.1	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keaneekaragaman Hayati di Daerah 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 03 Tahun 2012 tentang Taman Keaneekaragaman Hayati 3. Perpres No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Jumlah ekosistem yang dipetakan potensi kawasannya : 1 taman kehati	1 taman kehati	100	36,644,500	36,372,900	99.26	
1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keaneekaragaman Hayati di Daerah	Jumlah kelompok/lembaga pemeliharaan kawasan yang dibina : 2 kelompok	2 kelompok	100	35,644,000	34,830,000	97.72	

		5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati						
		6. Perpres No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional						
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>							
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>							
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1. PP 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup 2. PermenLHK No 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL/UPL atau SPPL 3. PermenLHK No 5 Tahun 2021 Tentang tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 4. PermenLHK No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limba B3	Jumlah kab/kota yang dibina atau diverifikasi terkait pengajuan lisensi komisi penilai amdalnya : 2 Kab/Kota  Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya : 5 Kab/Kota	2 Kab/kota	100	31,042,000	30,873,550	99.46

		5. PermenLHK No 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi AMDAL Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup						
1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Instansi Lingkungan Hidup dan Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup : 2 Kab/Kota	2 kab/kota	100	58,152,500	57,937,000	99.63
			Jumlah Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Perizinan Lingkungan Hidup : 2 objek	2 objek	100			
			Jumlah Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Evaluasi & Tindak Lanjut terhadap Sanksi Hukum yang diterbitkan : 7 objek	10 objek	143			
VIII	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>							
1	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>							
1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Fasilitasi kelompok GEPULING : 50 %	0	0	867,710,750	834,019,058	92.47
			Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan : 12 kab/kota	12 Kab/Kota	100			
			Jumlah kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R sampah : 45 kelompok	73 kelompok	162,2			
			Jumlah peserta Bimtek 3R : 110 orang	260 orang	236,4			

		Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Sampah : 50 %	0	0				
		Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup : 2 event	1 event	50				
		Pembinaan 3R di Kab/Kota : 18 kab/kota	18 Kab/Kota	100				
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>							
	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>							
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Permen LHK No.p.76/MenLHK/Setjen/Kum.1/20 19 tentang Adipura 2. Perpres No.97 tahun 2017 ttg Jakstranas dan Jakstrada	Jumlah buku DIKPLHD 2020 Prov. Sumbar yang dicetak : 5 set	5 set	100	192,469,850	188,274,350	97.82
			Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima Kalpataru : 5 orang	5 orang	100			
			Jumlah Kab/Kota dibina dan dinilai : 6 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0			
			Jumlah kab/kota yang ditetapkan sebagai Penyusun Buku DIKPLHD terbaik tingkat Prov. Sumbar : 0	0	0			
			Jumlah Kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai : 0	0	0			
			Jumlah Penghargaan Adiwiyata : 0	0	0			
			Jumlah peserta couching clinic : 80 orang	80 orang	100			
			Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang	52 orang	52			
			Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adywiyata : 100 sekolah	81	81			
IX	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							

1	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>							
1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi		Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan : 2 kasus	7 kasus	350	110,095,600	109,977,000	
			Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya : 11 kasus	16 kasus	145			
			Jumlah objek yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi dan implementasi penerapan sanksi : 3 objek	3 objek	100			
X	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>							
1	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>							
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah dokumen Materi teknis yang di susun : 1 dokumen	0	0	-	-	0
			Jumlah dokumen naskah akademis dan Ranperda yang di susun : 1 dokumen	0	0			
1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		jumlah dokumen lingkungan pengembangan TPA Regional yang disusun : 1 dokumen	1 dokumen	100	175,644,150	175,634,150	99.99
1.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional		Terlaksananya operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh dan Solok : 2 TPA	2 TPA	100	3,677,040,600	3,622,166,724	98.51
			Terpeliharanya infrastruktur di TPA Sampah Regional : 1 TPA	1 TPA	100			
1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah laporan kawasan pemantauan lingkungan yang dipantau : 4 laporan	4 laporan	100	65,455,500	65,406,800	99.93
1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Luas tanah yang dibebaskan : 1 paket	1 ha	100	1,083,450,500	570,648,653	52.67

**Tabel 2.3**  
**Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing**  
**Program/Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>			
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>			
1.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			
III	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>			
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemantauan kualitas air sungai hanya dapat dilakukan teradap 9 sungai dengan periode pemantauan 1 kali saja. Hal ini belum bisa menggambarkan kondisi kualitas sungai secara keseluruhan di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dalam memantau jumlah sungai lintas Kab/Kota di Sumatera Barat	Dibutuhkan anggaran yang memadai agar kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara optimal dan didapatkan data yang representatif.	
		Pemantauan kualitas air laut hanya dilakukan satu kali saja dalam setahun	Dibutuhkan anggaran yang memadai agar kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara optimal dan didapatkan data yang representatif.	
		Alokasi anggaran yang terbatas, sehingga pengawasan dan pembinaan hanya dapat dilakukan terhadap 15 objek usaha/kegiatan sebagai sumber pencemar terhadap media lingkungan (tanah, air, udara, dan laut).	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap ketaatan usaha/kegiatan	
		Intensitas perusakan sangat tinggi, anggaran yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sangat terbatas	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap ketaatan usaha/kegiatan	

		Pemantauan biota laut dilakukan terhadap Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Gambut. Tahun 2021 pemantauan terhadap pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan Ekosistem Gambut dan Mangrove	
		Intensitas perusakan lingkungan hidup lebih tinggi dibandingkan dengan upaya pemulihan	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan sehingga lahan yang rusak bisa kembali produktif.	
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Proklim di daerahnya karena refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19	1. Menghimbau kab./kota agar senantiasa menjaga lingkungan dan tetap melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui instruksi dan surat edaran Gubernur	
		2. Keterbatasan kemampuan SDM di daerah dalam inventarisasi GRK	2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan inventarisasi GRK	
1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1. Kebutuhan SDM pada UPTD Laboratorium belum terpenuhi	1. Mengusulkan penambahan personil baik dari PNS maupun non PNS (tenaga kontrak)	
		2. Standar kompetensi personil laboratorium belum terpenuhi	2. Mengadakan pelatihan ( <i>inhouse training</i> ) atau mengirim personil mengikuti pelatihan/magang pada instansi lainnya	
		3. Izin TPS LB3 dan pembuangan limbah belum diperoleh	3. Mengajukan permohonan izin TPS LB3 dan pembuangan limbah	
		4. UPTD Laboratorium belum terakreditasi dan teregistrasi	4. Melengkapi seluruh persyaratan akreditasi dan melakukan pendaftaran akreditasi ke KAN	
		5. Bahan/barang yang dibutuhkan tidak tersedia/indent sehingga pengadaan jadi tertunda	5. Mencari rekanan baru yang bisa mengadakan barang/bahan yang dibutuhkan atau menunggu barang/bahan tersedia	
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>			
1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>			
1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Keterbatasan peralatan pendukung untuk melakukan pemetaan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki peralatan pendukung untuk pemetaan	
1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			

VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>			
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>			
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran pengawasan masih rendah</li> <li>2. Banyaknya kegiatan yang IL diterbitkan Pemerintah Provinsi yang sudah vakum/tidak berkegiatan</li> <li>3. Komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan masih rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan perencanaan anggaran untuk pengawasan</li> <li>2. Mendetailkan data perizinan yang izinnya diterbitkan</li> <li>3. meningkatkan pemahaman dan komitmen usaha/kegiatan untuk mempedomani IL/PL dalam melaksanakan kegiatan</li> </ol>	
VIII	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			
1	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi</b>			
1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan ini sudah dapat dilaksanakan lebih maksimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebagian anggaran dirasionalisasi untuk penanganan pandemic covid-19, hanya satu Bimbingan Teknis yang batal dilaksanakan dengan dana Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, namun telah diakomodir dari dana Adipura.</li> <li>2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk menunjang program pengelolaan sampah berbasis 3R di masyarakat/kelompok masyarakat.</li> <li>3. Perda Nomor 8 Tahun 2018 ttg Pengelolaan sampah regional belum dapat menjawab permasalahan dalam pengelolaan sampah di Sumatera Barat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya bantuan dana dari pokok-pokok pikiran dewan (dana pikir) untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R dan pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah bagi masyarakat/kelompok masyarakat.</li> <li>2. Bimbingan Teknis yang batal dilaksanakan dengan dana Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup akhirnya diakomodir dengan dana Adipura.</li> <li>3. Meningkatkan peranserta dunia usaha untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat dalam pengadaan sarana pengelolaan sampah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dianggarkan untuk melakukan revisi Perda No.8 Tahun 2018 dengan langkah pertama penyusunan materi teknis pada tahun 2022</li> </ol>

		4. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Gepuling juga tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran untuk covid-19.	4. Mengajukan usulan revisi Perda Nomor Tahun 2018	
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			
	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>			
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Kegiatan Adipura pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena anggaran kegiatan untuk adipura dirasionalisasi untuk penanganan pandemic Covid-19.	1. Kegiatan penilaian Adipura yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini dialihkan menjadi kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Dokumen Jakstrada dengan kapasitas sesuai aturan masa pandemi covid-19.	
2. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Dokumen Jakstrada yang awalnya direncanakan sebanyak 100 orang hanya bisa terealisasi lebih kurang separuhnya (52 orang) karena aturan kegiatan ruangan yang hanya bisa 50 persen dari kapasitas normal.		2. Untuk tahun selanjutnya pembinaan kepada sekolah Adiwiyata akan dilakukan lebih optimal dengan dukungan pembiayaan yang lebih besar.		
3. Kegiatan pembinaan ke sekolah Adiwiyata juga tidak bisa memenuhi target diakibatkan dana untuk melakukan pembinaan sangat minim.				
IX	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>			
1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	1. Motif pengaduan yang beragam dan dipengaruhi oleh faktor non teknis. 2. Terdapat fasilitasi penanganan Pengaduan masyarakat yang masih berlanjut pada tahun berikutnya 3. Kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan pengaduan	1. Mengoptimalkan koordinasi dan keterlibatan semua OPD yang terlibat dalam penanganan pengaduan dan fasilitasi Gakum 2. Meningkatkan komitmen objek usaha/kegiatan yang telah diberikan sanksi guna penerapannya	
X	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			
1	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>			
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional			

1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional			
1.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional			
1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			

### 3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Program **Perencanaan Lingkungan Hidup**, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

1 sub kegiatan ini mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**.

b. Program **Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sub kegiatan :
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah media lingkungan yang dipantau.
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
  - Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan bahan kimia; Jumlah pengadaan peralatan laboratorium yang disediakan; Jumlah pengadaan supporting laboratorium dan Jumlah Laboratorium yang diperasionalkan.

Dari 3 sub kegiatan, 1 sub kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**. Adapun 2 sub kegiatan lainnya mendukung secara tidak langsung pencapaian target program dimaksud.

c. Program **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, sub kegiatan :

- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah kawasan taman kehati lainnya yang dikelola.
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah peserta/masyarakat pemeliharaan kawasan yang dibina.

2 sub kegiatan semuanya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**.

d. Program **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah Jumlah kab/kota yang dibina atau diverifikasi terkait pengajuan lisensi komisi penilai amdalnya dan Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 2 sub kegiatan hanya 1 sub kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**. Adapun 1 sub kegiatan lainnya mendukung secara tidak langsung pencapaian target program dimaksud.

e. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, sub kegiatan :

- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah anggota saka kalpataru; Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah; Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah; Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup; Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan; Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup dan Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi permukiman/kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

1 sub kegiatan ini mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**.

f. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi, sub kegiatan :

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah buku DIKPLHD 2020 Prov. Sumbar yang dicetak; Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima Kalpataru; Jumlah Kab/Kota dibina dan dinilai; Jumlah kab/kota yang ditetapkan sebagai Penyusun Buku DIKPLHD terbaik tingkat Prov. Sumbar; Jumlah Kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai; Jumlah

Penghargaan Adiwiyata; Jumlah peserta coaching clinic; Jumlah peserta sosialisasi dan Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

1 sub kegiatan ini mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**.

g. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, sub kegiatan :

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

1 sub kegiatan ini mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**.

h. **Program Pengelolaan Persampahan**, dicapai dengan pelaksanaan:

1) Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional, dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Materi teknis yang di susun dan Jumlah dokumen naskah akademis dan Ranperda yang di susun (**tidak jadi dilaksanakan**).
- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen lingkungan pengembangan TPA Regional yang disusun (**merupakan kegiatan lanjutan dari tahun lalu**).
- Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional, dengan output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh dan Solok dan Terpeliharanya infrastruktur di TPA Sampah Regional.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dengan

output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan kawasan pemantauan lingkungan yang dipantau.

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dengan output sub kegiatan ini adalah Luas tanah yang dibebaskan.

4 sub kegiatan semuanya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Pengelolaan Persampahan**.

## 2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2021 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Lingkungan Hidup lebih kurang masih sama dengan tahun sebelumnya yakni sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Pemenuhan kebutuhan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) melalui Aplikasi IKLH berbasis web	PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Satu data se Sumatera Barat bahkan secara Nasional sehingga tidak ada lagi data yang berbeda dari masing Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional
2	Pembebasan lahan masyarakat akibat longsor di TPA sampah regional Payakumbuh.	Laporan Akhir Penilaian Properti KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, Nomor: 00240/2.0051-02/PI/11/0339/1/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021	Kegiatan ini untuk menyelesaikan pembebasan lahan masyarakat seluas ± 1 Ha. Tahapan yang akan dilakukan adalah 1) Penilaian harga tanah melalui Belanja Jasa Konsultansi Penilaian Harga Tanah (JKPP Abdullah Fitriantoro & Rekan). 2) Pelaksanaan pengadaan tanah untuk buffer zone TPA Sampah Regional Payakumbuh melalui dan APBD sesuai Laporan Akhir Penilaian Properti KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan.
3	SK Gubernur Sumatera Barat No. 050/745-2021 tentang Pembentukan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Perpres No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Melaksanakan strategi penyelamatan danau prioritas nasional di Sumatera Barat dengan melibatkan pemangku kepentingan

	Provinsi Sumatera Barat		
4	Penetapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersedianya payung hukum dalam penetapan kebijakan dan rencana startegis dalam penetapan program pengelolan Lingkungan Hidup Sumatera Barat
5	Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam rangka pengurangan sampah dari sumber	Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang mengacu pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.60 Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan peralatan pengolah sampah kepada kelompok masyarakat melalui dana pokok-pokok pikiran dewan serta memberikan Bimtek serta sosialisasi kepada masyarakat/kelompok masyarakat tentang pengelolaan sampah berbasis 3R dan Nagari.</li> <li>2. Membantu kelompok masyarakat pengelola sampah di kabupaten/kota dengan program Wanita Peduli Sampah yang melibatkan dunia usaha untuk membantu pengadaan peralatan pengolah sampah berbasis 3R untuk mengurangi sampah di sumber.</li> </ol>

### 2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Tidak ada rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup.

#### 1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

**Tabel 2.5**

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Tidak ada Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Prov. Sumbar tahun 2020 bidang lingkungan hidup		

## 2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6

### Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Tidak ada Rekomendasi Pansus LKPJ terhadap LKPJ Kepala Daerah Prov. Sumbar tahun 2020 bidang lingkungan hidup		

## 3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi

Tabel 2.7

### Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Tidak ada Rekomendasi fraksi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Prov. Sumbar tahun 2020 bidang lingkungan hidup		

## 2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 2.8

### Penghargaan yang Diraih Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Vlog Video Pendek Nirwasita Tantra	KLHK	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat Tanggal 14 Oktober 2021
2	Nirwasita Tantra	KLHK	DPRD Provinsi Sumatera Barat	Secara online Tanggal 15 Juni 2021
3	Apresiasi Pembinaan Proklamasi Tahun 2021	KLHK	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	KLHK Jakarta tanggal 19 Oktober 2021

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dan Penugasan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup berjalan cukup optimal walaupun terjadi beberapa kali rasionalisasi anggaran terkait adanya bencana non alam Pandemi COVID-19. Kondisi Pandemi ini juga berdampak terhadap beberapa kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa dilaksanakan dan/atau baru sampai tahap persiapan pelaksanaan. Adanya kendala ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.